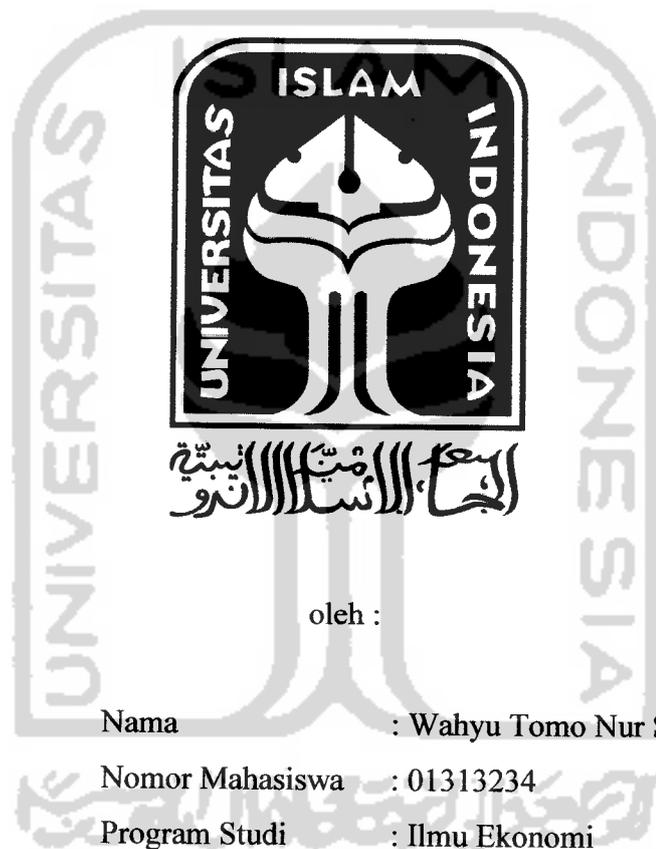


**Kausalitas Pengeluaran Pembangunan
dengan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah
Periode (1985-2005)**

SKRIPSI



oleh :

Nama : Wahyu Tomo Nur Soebekti

Nomor Mahasiswa : 01313234

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2007

**Kausalitas Pengeluaran Pembangunan
dengan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah
Periode (1985-2005)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

oleh :

Nama : Wahyu Tomo Nur Soebekti

Nomor Mahasiswa : 01313234

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku“

Yogyakarta, 9 Agustus 2007

Penulis,

Wahyu Tomo Nur Soebekti

PENGESAHAN

Kausalitas Pengeluaran Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah Periode (1985-2005)

Nama : Wahyu Tomo Nur Soebekti

Nomor Mahasiswa : 01313234

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, April 2006

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Drs. Moh. Bektu Hendrie Anto, M.Sc

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Kausalitas Pengeluaran Pembangunan
dengan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah
Periode (1985-2005)**

Disusun Oleh: Wahyu Tomo Nur Suebekti

Nomor Mahasiswa : 01313234

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada Tanggal ,Agustus 2007

Pembimbing Skripsi : Drs. Moh. Bekti Hendrie Anto, M.Sc

Penguji I : Drs. Jaka Sriyana, M.Si, Ph.D

Penguji II : Dra. Diana Wijayanti, M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Ismai Ishak, M.Bus., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

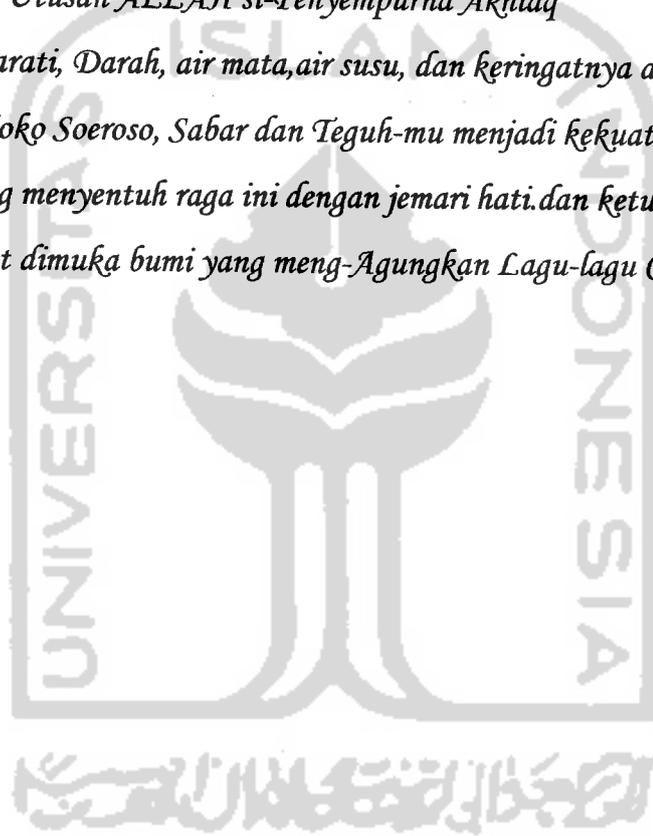
- *“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan **Qalam**. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5).*
- *Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah ,ereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. (H.R Muslim dalam Shahih-nya).*
- *“Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfakkanya pada malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari.” (H.R Bukhari dan Muslim)*
- *Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk ALLAH S.W.T yang maha gaib.*

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya kecil ini persembahkan untuk:

- *ALLAH S.W.T, Raja Manusia*
- *Muhammad Utusan ALLAH si-Penyempurna Akhlaq*
- *Bunda Sumarati, Darah, air mata, air susu, dan keringatnya ada ditubuhku*
- *Ayahnda Djoko Soeroso, Sabar dan Teguh-mu menjadi kekuatan buatku*
- *Kekasih yang menyentuh raga ini dengan jemari hati dan ketulusan hatinya.*
- *Seluruh umat dimuka bumi yang meng-Agungkan Lagu-lagu Cinta ALLAH.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAUSALITAS PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROPINSI JAWA TENGAH PERIODE 1985-2005”

Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran guna mengoreksi dan memperbaiki atas kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Dengan berbagai keterbatasan itulah, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini bisa terselesaikan dengan baik.. sehingga pada kesempatan kali ini dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. H. M. B Hendrieanto, Drs, M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
2. Asmai Ishak, Drs., M.Bus., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Jaka Sriyana, SE., M.Si. Selaku Ka-Prodi dan ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si, selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Edi Suandi Hamid., M.ec , selaku Rektor Universita Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik.
5. Orang tua (ayahanda “Djoko Soeroso & ibunda Sumaryati dan saudara-saudaraku, mba tiena, mas dwie, abdul kohar (thank untuk semuanya) yang memberikan dukungan moril dan materiil sampai selesainya skripsi ini.
6. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Rekan-rekan di HPM (mas adink, mas fany kencung, jibroug, dul gopep, brexs, ”kapan kita reuni maen remi? carwen, dimas, adikku yayuk..
8. Anak Nonkrong (kasep, omen, riky, rizzaa, sahrul, Xubiel, Dadang.), anak-anak *kos* (hafidz, tamrin, muchlis) serta ibu kos+bpk kos yang baik hati(mana makannanya buu??).
9. Anak – anak KKN SL-30 (si bos edan, wanda “super jail”, topix al kacau, nana”krip”keep smile”, teta, takur sink, ima(di mana kamu?), kiky, putra,

dayat, asfar, “thank buat kegembiraan yang udah diberikan”(We are miss u guy”) .

10. Teman-teman EP 2001 (kasep, omen, arip, dadang, kancil, sahrul,riza”ayo za kamu bias!!, *dan masih banyak lagi...*) Friendship For Ever!!!
11. My Soul – Tri Setiasih, “*Lets Get Our Dream*”, kelembutan hati dan halus tutur kata-mu adalah semangat ku dalam melangkah.
12. Rekan – rekan seperjuangan (Ading, jibroug, kencunk, pepy,fany, wenink.).
13. Best Friends “(diky, firman, prenges, boim, jiban, anguz, emot, maju terus pantang mundur...!!!
14. Semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini.

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2007

Penulis

Wahyu Tomo Nur Soebekti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	x
Halaman Daftar Tabel	xiv
Halaman Daftar Gambar	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xvii
Halaman Abstraksi	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6

1.4. Sistematikan Penulisan	7
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN	9
2.1. Keadaan Geografis	9
2.2. Keadaan Penduduk	10
2.2.1. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk	10
2.2.2. Sex Ratio Penduduk.....	11
2.2.3. Struktur Penduduk Menurut Golongan Umur.....	12
2.3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	13
2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	13
2.3.2. Angka Beban Tanggungan	16
2.4. Tingkat Pendidikan	16
2.5. Pengeluaran Pembangunan.....	17
BAB III KAJIAN PUSTAKA	20
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	26
4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	26
4.2. Teori Pertumbuhan Adam Smith.....	27
4.3. Teori Pertumbuhan Thomas Robert Malthus.....	29
4.4. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	30
4.4.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan	

Pengeluaran Pemerintah	31
4.4.2. Hukum Wagner	32
4.5. Kebijakan Keuangan Daerah.....	33
4.6. Kebutuhan Fiskal Daerah	35
4.7. Hipotesa.....	41
BAB V METODOLOGI PENELITIAN	42
5.1. Jenis Data dan Sumber Data.....	42
5.2. Definisi Variabel.....	42
5.3. Metode Analisis Data.....	43
5.3.1. Uji Stasioneritas.....	43
5.3.2. Uji Kausalitas Granger.....	47
5.3.3. Final Prediction Error (FPE).....	49
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
6.1. Analisis Hasil Data.....	51
6.2. Hasil Analisis.....	51
6.2.1. Uji Stasioneritas	51
6.2.1.1. Uji akar-akar unit.....	51
6.2.1.2. Uji Integrasi	52
6.2.1.3. Uji Kointegrasi	53
6.2.2. Uji Kausalitas Granger.....	54
6.2.3. Final Prediction Error (FPE).....	58

6.3. Pembahasan..... 59

BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI 63

7.1. Kesimpulan 63

7.2. Implikasi 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 .Jaju Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pembangunan Propinsi Jawa Tengah.....	4
2.3 Pertumbuhan Penduduk Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2004.....	14
2.4 Sruktur Penduduk Jawa Tengah Menurut Golongan Umur Tahun 2000-2004.....	12
2.5 Kelompok Usia Produktif Propinsi Jawa Tengah 2000 – 2004.....	13
2.6 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (1990 – 2005)	15
2.7 Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2004	17
2.8 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 1990 – 2003 (Ribu Rp)	18
6.1. Hasil uji akar-akar unit	52
6.2. Hasil uji derajat integrasi pertama	53
6.3. Hasil Uji Kointegrasi	54
6.4. Hasil Granger dengan lag 1	55

6.5. Hasil uji Granger lag 2	56
6.6. Hasil uji Granger dengan lag 3	57
6.7. Hasil uji Ganger dengan lag 4	57
6.8. Hasil Uji FPE untuk PB dan PE	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Kurva Pengeluaran Pemerintah pada Keynesian Cross.....	31



DAFTAR LAMPIRAN**Lampiran**

- I. Data Perkembangan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pembangunan Propinsi Jawa Tengah tahun 1985-2005
- II. Hasil Regresi Linier Tabel uji akar-akar unit
- III. Tabel uji derajat integrasi tingkat diferensi pertama
- IV. Tabel uji kointegrasi
- V. Hasil Uji Granger
- VI. Hasil Uji FPE



Abstraksi

Penelitian ini berjudul “kausalitas granger antara pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah periode (1985-2005)”. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa pengeluaran pembangunan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah berdasarkan harga konstan yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan penelitian adalah untuk mengestimasi/menganalisis hubungan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama periode 1985-2005. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kausalitas Granger.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu topik yang paling menarik dalam makro ekonomi. Banyak faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian, peran pemerintah yang diwujudkan dalam pengeluaran pemerintah dan peran swasta yang didukung oleh investasi adalah hal yang paling utama dalam penggerak perekonomian. Keberhasilan pembangunan akan tercapai jika pertumbuhan ekonominya tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian nasional menuju perekonomian yang seimbang dan dinamis, yang bercirikan industri yang kuat dan maju dan pertanian yang tangguh. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang yang lainnya, sekaligus sebagai kekuatan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam hal perkembangan perekonomian, pemerintah menjalankan banyak peran penting. Peran pemerintah dapat dikaji dari sisi pengeluaran pemerintahnya. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian. Pemahaman akan betapa pentingnya peran pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan yang

berfungsi memicu perekonomian berhadapan dengan kondisi di lapangan yang tidak dapat menjamin berjalannya fungsi tersebut dengan baik. Besarnya pengeluaran pemerintah dalam memicu perekonomian dapat dilihat dari pengeluaran pembangunannya untuk berbagai kegiatan sektor ekonomi. Misalnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengeluaran pembangunan yang dianggarkan dan dikeluarkan oleh pemerintah turut menentukan besarnya peran pemerintah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Dipandang sebagai investasi, pengeluaran pembangunan sangat diperlukan guna menjaga dan memelihara momentum pembangunan secara berkelanjutan. Bersama-sama dengan investasi swasta domestik, pengeluaran ini tidak hanya berpengaruh pada sisi permintaan, tetapi juga berpengaruh pada sisi penawaran agregat, sebagaimana dikemukakan dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar (Jhingan, 2000). Sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu daerah, kebutuhan akan pengeluaran pembangunan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rostow dan Musgrave dalam (Sutrisno, 1991) menyatakan bahwa pada tahap awal dari perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah dari total investasi adalah besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana jalan, irigasi, jembatan, tenaga listrik, jaringan komunikasi. Oleh karena itu adalah wajar jika dikatakan pengeluaran pemerintah akan makin meningkat dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, dimana dalam istilah

Adolf Wagner dikenal dengan "*Gesets der Wachsenden Ausdehmug den Staatstatigkeiten*" atau hukum semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan negara.

Mengingat pentingnya pengeluaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah harus terus berupaya melakukan peningkatan efektifitas pengeluaran APBD khususnya pengeluaran pembangunan selain itu juga mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program-program pemerintah yang dilakukan di daerah dan untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik, dalam artian harus benar-benar mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diterima. Sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi daerah bisa ditingkatkan.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa Tengah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah sebesar 80728499,37 juta rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 1991 menjadi 86507094,72 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1992 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah 92943359,13 juta rupiah. Pada tahun 1993 PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 92943359,13 juta rupiah menjadi 98609850,28 juta rupiah pada tahun 1993. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi 125166672,26 juta rupiah dengan pertumbuhan 3,03%. Namun pada tahun 1998 akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB

Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 110468846,17 juta rupiah atau pertumbuhannya turun menjadi -11,74 %. Penurunan PDRB Jawa Tengah tersebut hanya terjadi pada tahun 1998, karena pada tahun 1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi 114326423,12 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan 3,49%, hingga pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar 143051213,88 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pembangunan
Propinsi Jawa Tengah (1990-2005)

Tahun	PDB Harga konstan 2000 (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengeluaran Pembangunan (000 Rp)
1990	80728499,37	-	141497272,84
1991	86507094,72	7,16	129558522,41
1992	92943359,13	7,44	101723405,47
1993	98609850,28	6,10	126693611,03
1994	105476964,15	6,96	164629414,63
1995	113222000,87	7,34	230044210,88
1996	121487881,47	7,30	251713601,78
1997	125166672,26	3,03	198586412,22
1998	110468846,17	-11,74	224831581,03
1999	114326423,12	3,49	286945808,50
2000	114701304,81	0,33	354134165,44
2001	118816400,29	3,59	367160178,00
2002	123038541,13	3,55	869915874,00
2003	129166462,45	4,98	1029687188,00
2004	135789872,31	5,13	1761257374,00
2005	143051213,88	5,35	1822411289,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.

Berbeda halnya dengan PDRB, untuk pengeluaran pembangunan Jawa Tengah cenderung mengalami naik turun. Pada tahun 1990 besarnya pengeluaran pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp 141.497.272,84 ribu

rupiah. Namun pada tahun 1991 pengeluaran pembangunan Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi Rp 129.558.522,41 ribu rupiah dan Rp 101.723.405,47 ribu rupiah pada tahun 1992. Namun penurunan tersebut tidak lama, karena pada tahun 1993 pengeluaran pembangunan mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 126.693.611,03 ribu rupiah. Kenaikan tersebut terjadi hingga masa sebelum krisis ekonomi pada tahun 1996 menjadi Rp 251.713.601,78 ribu rupiah. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 berdampak terhadap penurunan pengeluaran pembangunan Jawa Tengah, besarnya pengeluaran pembangunan turun menjadi Rp 198.586.412,22 ribu rupiah. Pada tahun 1998 pengeluaran pembangunan Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 224.831.581,03 juta rupiah hingga pada tahun 2005 besarnya pengeluaran pembangunan mencapai Rp 1.822.411.289 ribu rupiah.

Pembangunan yang dilakukan di Daerah di Propinsi Jawa Tengah sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya gedung-gedung yang didirikan, perbaikan-perbaikan jalan sebagai prasarana transportasi, perubahan hasil pertanian yang selalu cenderung meningkat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Potensi yang dimiliki Propinsi Jawa Tengah pun sangat menunjang pembangunan disegala bidang yang sedang dilaksanakan. Pengeluaran yang dilakukan untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah diperoleh dari pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Propinsi Jawa Tengah. Apabila Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat maka diharapkan Propinsi Jawa Tengah dapat memperkecil kergantungan terhadap subsidi atau bantuan bagi pembangunan dari

pemerintah pusat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **“Uji Kausalitas Granger Antara Pengeluaran Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah Periode (1985-2005)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana hubungan kausalitas antara pengeluaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1985-2005?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1985-2005.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Di samping itu, guna meningkatkan, memperluas dan memantapkan wawasan dan keterampilan yang membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian atau gambaran umum atas subyek penelitian yang diambil dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai gambaran secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi dua bagian: *pertama*, mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. *Kedua*, hipotesis merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografi

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh dua Provinsi besar Jawa Barat dan Jawa Timur, dan satu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang bagian utara dan selatan terbentang pantai yang cukup panjang. Dengan luas wilayah kurang lebih 3.254.412 Ha. Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 564 Kecamatan 8.563 desa/kelurahan. Daerah yang terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.13.851 Ha atau sekitar 6,57 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling kecil yaitu hanya seluas 1.812 Ha. Topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut :

1. Ketinggian antara 0 – 100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3 %,
2. Ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%,
3. Ketinggian 500 – 1.000 m dari permukaan laut seluas 14,7 %,
4. Ketinggian di atas 1.000 m dari permukaan laut seluas 4,6 %.

2.2. Keadaan Penduduk

2.2.1. Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah jumlah Penduduk di Jawa Tengah tahun 2004 adalah 32.397.431 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2003 (32.052.840 jiwa) terjadi penambahan jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 344.591 jiwa (1,07 %). Penyebaran penduduk Jawa Tengah belum secara merata. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 995 jiwa setiap kilometer persegi, dimana wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 11 ribu setiap kilometer persegi. Data mengenai kepadatan dapat dilihat pada lampiran Tabel Luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2004.

Bila kita lihat jumlah rumah tangga di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari sebesar 7,96 juta pada tahun 2003 menjadi 8,35 juta pada tahun 2004 atau naik sekitar 4,87 persen. Berdasarkan data banyaknya rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga menurut Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2004 rata-rata penduduk per rumah tangga tercatat sebesar 3,88 jiwa.

Sementara itu jumlah penduduk tertinggi dan terendah pada tahun 2004 masih sama dengan tahun 2003, dimana yang tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 1.784.094 jiwa dan terendah di Kota Magelang sebanyak 123.576 jiwa.

Tabel 2.3
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2000 – 2004

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan	Prosentase
2000	30.774.946	-	-
2001	31.063.818	288.872	0,94
2002	31.691.866	628.048	2,02
2003	32.052.840	360.974	1,14
2004	32.397.431	344.591	1,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah mulai mengalami peningkatan dari tahun 2001 sebesar 0,94 % dan tahun 2004 sebesar 1,07 %.

2.2.2. Sex Ratio Penduduk

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan ratio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Berdasarkan data Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah ratio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah tahun 2004 sebesar 99,82 hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Data rinci mengenai Sex Ratio menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel lampiran “Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur menurut Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2004”

2.2.3. Struktur Penduduk Menurut Golongan Umur

Struktur Penduduk Jawa Tengah menurut golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.4
Struktur Penduduk Jawa Tengah Menurut
Golongan Umur Tahun 2000 – 2004

Golongan Umur	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003	2004
< 1	470.699	528.153	518.118	870.244	814.683
1 - 4	2.007.647	2.148.007	2.169.159	1.692.242	1.923.054
5 - 14	6.219.667	6.279.900	6.332.011	6.288.873	6.307.449
15 - 44	14.914.069	14.791.458	15.123.085	15.452.356	15.467.909
45 - 64	5.269.177	5.353.495	5.533.490	5.686.550	5.765.998
65 keatas	1.894.587	1.962.805	2.016.003	2.062.575	2.118.338
Total	30.775.846	31.063.818	31.691.866	32.052.840	32.397.431

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005)

Penduduk golongan umur 1-4 tahun di Jawa Tengah Tahun 2004 cenderung naik sekitar 13,64 persen bila dibandingkan dengan penduduk golongan umur yang sama pada tahun 2003, tetapi sebaliknya penduduk berumur kurang dari 1 tahun di Jawa Tengah mengalami penurunan sejumlah 55.561 jiwa atau sekitar 6,38 persen. Adapun perbandingan komposisi proporsional penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut usia produktif pada tahun 2000 sampai dengan 2004 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Kelompok Usia Produktif Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2000 – 2004

Kelompok Usia (Tahun)	TAHUN				
	2000	2001	2002	2003	2004
0 - 14	28,29 %	28,83 %	28,46 %	27,61 %	27,92 %
15 - 64	65,58 %	64,85 %	65,18 %	65,95 %	65,54 %
65 keatas	6,16 %	6,32 %	6,36 %	6,43 %	6,54 %

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur dibawah 15 tahun naik bila dibandingkan dengan tahun 2003 yaitu sebesar 0,31 persen. Sedangkan untuk penduduk usia lanjut (kelompok umur diatas 65 tahun) bertambah dari 6,43 persen menjadi 6.54 persen.

2.3. Keadaan Sosial Ekonomi

2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah

dicapai. Dalam menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasilnya.

Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah serta untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto merupakan pendapatan atas dasar faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah/daerah ditambah penduduk asing yang berada di wilayah/daerah tersebut.

Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Jawa Tengah dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1990 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah sebesar 80728499,37 juta rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 1991 menjadi 86507094,72 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 7,16% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1992 besarnya PDRB Jawa Tengah adalah 92943359,13 juta rupiah. Pada tahun 1993 PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 92943359,13 juta rupiah menjadi 98609850,28 juta rupiah pada tahun 1993. Peningkatan ini terus terjadi sampai tahun 1997 menjadi 125166672,26 juta rupiah dengan

pertumbuhan 3,03%. Namun pada tahun 1998 akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan PDRB Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi 110468846,17 juta rupiah atau pertumbuhannya turun menjadi -11,74 %. Penurunan PDRB Jawa Tengah tersebut hanya terjadi pada tahun 1998, karena pada tahun 1999 PDRB Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi 114326423,12 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan 3,49%, hingga pada tahun 2005 besarnya PDRB Jawa Tengah sebesar 143051213,88 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35.

Tabel 2.6
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Atas dasar harga Konstan 2000 Jawa Tengah (1990-2005)

Tahun	PDB Harga konstan 2000 (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1990	80728499,37	-
1991	86507094,72	7,16
1992	92943359,13	7,44
1993	98609850,28	6,10
1994	105476964,15	6,96
1995	113222000,87	7,34
1996	121487881,47	7,30
1997	125166672,26	3,03
1998	110468846,17	-11,74
1999	114326423,12	3,49
2000	114701304,81	0,33
2001	118816400,29	3,59
2002	123038541,13	3,55
2003	129166462,45	4,98
2004	135789872,31	5,13
2005	143051213,88	5,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.

2.3.2. Angka Beban Tanggungan

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur maka angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 sebesar 52,57 terjadi kenaikan dari tahun 2003 yang semula 51,63. artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekita 53 orang penduduk usia tidak produktif.

2.4. Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2004 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berusia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 2.764.785 orang, tidak/belum tamat SD/MI sebesar 5.828.482 orang, tamat SD/MI sebesar 9.526.129 orang, tamat SLTP sebesar 4.385.889 orang, tamat SLTA sebesar 3.362.031 orang dan sebesar 760.254 orang tamatan Diploma/akademi/Diploma IV/Universitas/ Perguruan Tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2003 telah terjadi peningkatan di bidang pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan, artinya semakin banyak orang yang bisa menikmati pendidikan dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Akan tetapi bila dicermati, ternyata pada tahun 2004 jumlah penduduk perempuan yang berusia 10 tahun keatas yang buta huruf dan tidak/belum pernah sekolah lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, sementara yang

tamat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, AKA/DIPLOMA dan tamat Universitas lebih rendah dari pada penduduk laki-laki.

Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan dalam mengenyam pendidikan dari pada perempuan, meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk berusia 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000 – 2004.

Tabel 2.7
Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000 – 2004

Tahun	Tdk/Blm Pernah Sklh	Tdk/Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	DIP/AK/PT
2000	2.968.609	6.051.199	9.102.561	3.623.142	2.915.930	640.395
2001	3.354.161	6.244.206	8.827.623	3.508.102	2.761.190	697.247
2002	2.897.441	6.164.446	9.204.288	3.950.777	3.021.149	727.433
2003	2.932.376	6.025.940	9.583.156	4.136.700	3.066.563	738.472
2004	2.764.785	5.828.482	9.526.129	4.385.889	3.362.031	760.254

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2005)

2.5. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran Pembangunan Propinsi Jawa Tengah adalah jumlah keseluruhan pengeluaran pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk pembangunan di seluruh sektor ekonomi atau pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa untuk pengeluaran pembangunan. Misalnya pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Pengeluaran Pembangunan di Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun tidak selalu

mengalami peningkatan, adakalanya untuk tahun-tahun tertentu cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.8
Perkembangan Pengeluaran Pembangunan
Propinsi Jawa Tengah Th 1990 – 2003 (Ribu Rp)

Tahun	Pengeluaran Pembangunan (Ribu Rp)	Pertumbuhan (%)
1990	141497272,84	-
1991	129558522,41	-8,44
1992	101723405,47	-21,48
1993	126693611,03	24,55
1994	164629414,63	29,94
1995	230044210,88	39,73
1996	251713601,78	9,42
1997	198586412,22	-21,11
1998	224831581,03	13,22
1999	286945808,50	27,63
2000	354134165,44	23,41
2001	367160178,00	3,68
2002	869915874,00	136,93
2003	1029687188,00	18,37
2004	1761257374,00	71,05
2005	1822411289,00	3,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, Yogyakarta (data diolah).

Pengeluaran pembangunan Jawa tengah cenderung mengalami naik turun. Pada tahun 1990 besarnya pengeluaran pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp 141.497.272,84 ribu rupiah. Namun pada tahun 1991 pengeluaran pembangunan Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi Rp 129.558.522,41 ribu rupiah dan Rp 101.723.405,47 ribu rupiah pada tahun 1992. atau penurunan 8,44 persen dan 21,48 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun penurunan tersebut tidak lama, karena pada tahun 1993 pengeluaran pembangunan mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 126.693.611,03 ribu rupiah atau mengalami kenaikan 24,55%. Kenaikan

tersebut terjadi hingga masa sebelum krisis ekonomi pada tahun 1996 menjadi Rp 251.713.601,78 ribu rupiah. Adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 berdampak terhadap penurunan pengeluaran pembangunan Jawa Tengah, besarnya pengeluaran pembangunan turun menjadi Rp 198.586.412,22 ribu rupiah. Pada tahun 1998 pengeluaran pembangunan Jawa Tengah mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 224.831.581,03 juta rupiah hingga pada tahun 2005 besarnya pengeluaran pembangunan mencapai Rp 1.822.411.289 ribu rupiah.



BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Rahman (2005) telah melakukan studi tentang “*kausalitas pengeluaran pemerintah dan investasi serta Produk Domestik Bruto dengan menggunakan metode granger*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kausalitas antara variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi serta Produk Domestik Bruto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Granger untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel Pengeluaran Pemerintah dan Investasi serta Produk Domestik Bruto. Di samping itu untuk mendapatkan estimasi, dilakukan dengan pengujian Stasionaritas, Kointegrasi, Derajat Integrasi, Granger. Hasil estimasi menggunakan program Eviews menunjukkan bahwa Uji Stasionaritas tidak stasioner, Uji Kointegrasi tidak terkointegrasi sehingga dilakukan uji Derajat Integrasi baru dilakukan uji Kausalitas Granger. Pada uji Derajat Integrasi stasioner pada variabel Pengeluaran Pemerintah dengan ADF mempunyai akar unit 1% sebesar 4,6193. Dan pada variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan ADF mempunyai akar unit sebesar 4,6193. Karena dalam pengolahan data sudah stasioner maka dilanjutkan ke Uji Kausalitas Granger Pengeluaran Pemerintah dan Investasi serta Produk Domestik Bruto. Dalam Uji Kausalitas Granger variabel pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi hipotesis nol $\alpha = 0,01$ berarti ditolak atau dapat dikatakan Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, dan variabel Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi

Pengeluaran Pemerintah hipotesis nol $< \alpha = 0,1$. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi stasioner, terdapat hubungan kausalitas dua arah, yaitu Pengeluaran Pemerintah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah.

Rosyadi (2000) telah melakukan studi tentang “*Hubungan Pengeluaran Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi*”. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi berdasarkan harga konstan, tanpa minyak dan gas bumi dan Pengeluaran Pembangunan, yang diperoleh dari Kantor Bappeda Kota Jambi, Bagian Keuangan Sekretariat Kota Jambi dan Biro Pusat Statistik Kota Jambi serta Departemen Tenaga Kerja Kota Jambi. Tujuan penelitian adalah untuk mengestimasi/menganalisis hubungan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang diestimasi dengan regresi kuadrat terkecil (OLS) dan menerapkan model kausalitas koreksi kesalahan (ECM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan. Dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Wida (2005) telah melakukan studi tentang “*kausalitas jumlah uang beredar (JUB) dan pertumbuhan ekonomi tahun 1976-2001 menggunakan metode granger*”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa keberadaan hubungan kausalitas antara jumlah uang yang beredar dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1976-2001. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data time series dalam kurun waktu 26 tahun. Variabel yang digunakan adalah variabel jumlah uang beredar dan variabel pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Granger untuk mengetahui hubungan kausalitas antara variabel jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi dengan menggunakan Program Eviews menunjukkan bahwa uji stasioneritas dengan menggunakan uji Dickey Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk variabel jumlah uang beredar stasioner. Pada uji DF dan ADF nilainya paling kecil dibanding dengan nilai $\alpha = 0,05$ sebesar -11,05827 dan -4,388579. Kemudian uji DF dan ADF untuk variabel pertumbuhan ekonomi juga stasioner. Hal ini ditunjukkan dengan nilai DF dan ADF yang paling kecil dibanding dengan nilai $\alpha = 0,05$ sebesar -4,163049 dan -3,445445. Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa terjadi hubungan kausalitas satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi mempengaruhi jumlah uang beredar pada Lag 2 sebesar 0,01273, Lag 3 sebesar 0,00851 dan Lag 4 sebesar 0,02860 karena probabilitasnya kurang dari $\alpha = 0,05$.

Endang (2005) telah melakukan studi tentang “*kausalitas granger antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Produk Domestik Regional*

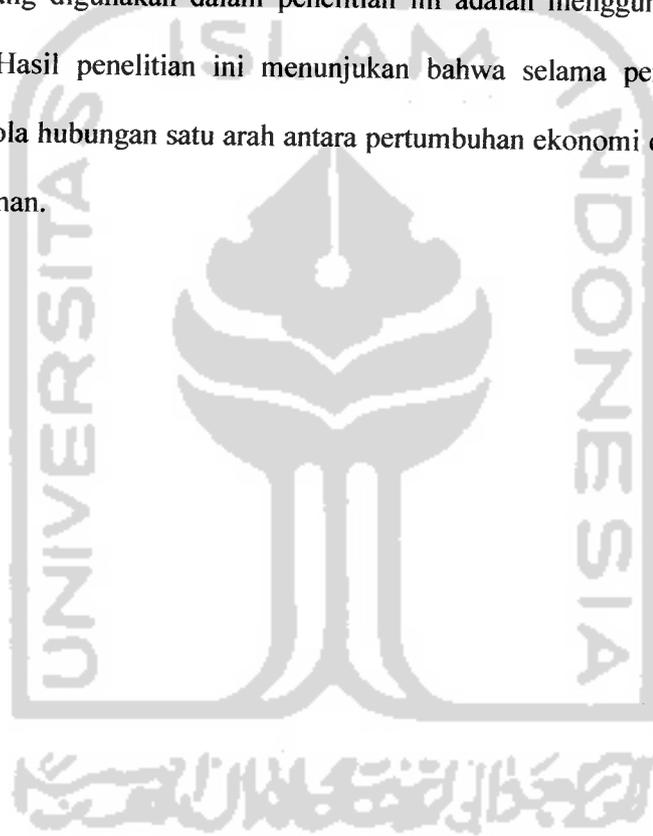
Bruto (PDRB) di Jawa Tengah tahun 1978 – 2003". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara PMDN dengan PDRB. Metode analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis granger untuk menentukan pola hubungan kausalitas antara variabel PMDN dan PDRD. Disamping itu untuk mendapatkan hasil estimasi yang mana dilakukan pengujian stasioneritas dengan menggunakan uji DF (Dickey Fuller), selain itu dilakukan uji Differencing (Penstasioneran). Untuk uji Stasioneritas pada variabel PMDN ternyata stasioner pada nilai absolut $t >$ nilai absolut $t(0,10)$ dengan AIC minimum sebesar 31.79731 dan memiliki koefisien $\delta < 0$ (negatif). Sedangkan uji DF variabel PDRB tidak stasioner karena nilai absolut $t <$ nilai absolut $t(0,10)$. Karena variabel PDRB belum stasioner maka untuk mempercepat memperoleh data yang stasioner maka variabel PDRB di ln-kan, tetapi juga tidak stasioner. Karena data belum stasioner maka dilakukan penstasioneran Differencing), stasioneritas tercapai pada difference pertama. Pada uji kausalitas Granger menunjukkan hubungan satu arah yaitu variabel PDRB mempengaruhi PMDN pada lag 1. Sedangkan pada lag 2,3,4,5,6,7 tidak terdapat analisa dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan searah yaitu antara PDRB ke PMDN di Jawa Tengah.

Fendityana (2005) telah melakukan studi tentang "*Kausalitas Granger Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penanaman Modal asing Langsung Indonesia Periode 1986-2003*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode 1986-1997/II pertumbuhan PMA berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan PMA, yang salah satu caranya yaitu dengan kebijakan memperluas sektor-sektor yang bisa dimasuki oleh investor asing (tahun 1986). Kebijakan ini diambil pemerintah karena dengan adanya PMA akan membawa dampak positif bagi negara tuan rumah yang meliputi adanya transfer teknologi, kesempatan untuk memicu tenaga kerja dan pertumbuhan industri ekspor yang cepat, sehingga dengan masuknya investasi asing industri lokal dapat menyerap dan mengaplikasikan kemajuan teknologi dan peningkatan efisiensi untuk ikut ambil bagian dalam perdagangan internasional. Dengan peningkatan ekspor juga akan meningkatkan PDB yang diterima pemerintah. Untuk periode setelah krisis ekonomi (1997/III-2003) terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung berpengaruh terhadap pertumbuhan PMA. Artinya bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya yang berupa penanaman modal asing, dengan kata lain nilai penanaman modal asing akan meningkat bila pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga meningkat atau tinggi. Hal ini terjadi karena pada saat periode sebelum terjadinya krisis moneter, para investor memandang tingkat pertumbuhan bukanlah hal yang pokok untuk menanamkan investasinya tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi para investor lebih memperhatikan kestabilan dari pertumbuhan ekonomi untuk lebih meyakinkan bahwa investasi yang dilakukan akan memberikan tingkat keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “kausalitas granger antara pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah

periode (1985-2005)". Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa pengeluaran pembangunan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah berdasarkan harga konstan yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuan penelitian adalah untuk mengestimasi/menganalisis hubungan pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah selama periode 1985-2005. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kausalitas Granger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan.



BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output total secara terus menerus dalam jangka panjang. Pengertian pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah tanpa memandang kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Arsyad, 1992:191).

Istilah pertumbuhan ekonomi sering didefinisikan oleh para ahli dengan istilah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita, tetapi biasanya istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju dan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Tetapi tidak berarti kenaikannya secara terus menerus. Suatu perekonomian akan dapat

mengalami penurunan dalam tingkat kegiatan ekonominya apabila terjadi resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor. Tetapi jika keadaan demikian hanya bersifat sementara, kegiatan ekonomi meningkat secara rata-rata dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi. (Arsyad, 1992 : 39)

4.2. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith dalam bukunya *Inquiry Into the Nature and of the Wealth of Nation* (1976) menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara sistematis. Ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu :

a. Pertumbuhan Output total.

Ada 3 (tiga) unsure pokok dalam sisitem produksi suatu Negara menurut Adam Smith, yaitu :

1. Sumber daya alam yang tersedia (masih diujudkan sebagai faktor produksi tanah).
2. Sumber daya manusia (atau jumlah penduduk).
3. Stok barang kapital yang ada.

Sumber daya akan merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat, di mana sumber daya alam merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi.

Sumber daya manusia dalam arti angkatan kerja adalah input dalam proses produksi dan mempunyai peran dalam proses pertumbuhan ekonomi. Jumlahnya akan terus bertambah atau berkurang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses produksi. Selain sumber daya manusia,

stok kapital juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok kapital dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan output yang diproduksi, dan dengan demikian menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi.

Stok kapital mempengaruhi tingkat output melalui dua jalur, yaitu jalur pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang dimaksud pengaruh tidak langsung adalah posisi kapital sebagai input dari output. Sedangkan pengaruh tidak langsung kapital terhadap output dihasilkan dari peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Tambahan kapital akan memungkinkan adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Makin besar kapital yang digunakan dalam proses produksi, maka skala produksi akan semakin besar, sehingga makin banyak yang harus dikerjakan dalam satu divisi kerja tertentu. Dalam keadaan ini dimungkinkan untuk dilakukan spesialisasi dan pembagian kerja. Sehingga semakin tinggi produktivitas per pekerja, maka output juga akan meningkat. Menurut Smith pembagian dan spesialisasi kerja akan meningkatkan produktivitas pekerja melalui tiga hal : (1). Meningkatkan ketrampilan pekerja karena selalu menangani hal yang sama; (2). Penghematan waktu dalam memproduksi barang, yaitu tidak harus berpindah dari satu jenis pekerjaan kepekerjaan yang lain; (3). Penemuan mesin hemat tenaga kerja.

b. Pertumbuhan penduduk.

Menurut Adam Smith, jumlah tingkat yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten akan meningkatkan jumlah penduduk. Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan akan ditentukan oleh laju stok modal dan laju pertumbuhan output (Arsyad, 1992:49).

4.3. Teori Pertumbuhan Thomas Robert Malthus

Keberhasilan pembangunan sebuah perekonomian menurut malthus adalah kesejahteraan. Sedangkan suatu Negara dikatakan sejahtera jika GNP potensialnya meningkat. Untuk meningkatkan GNP potensialnya maka sektor pertanian dan industri adalah sektor yang paling dominan. Jika kedua sektor tersebut dapat ditingkatkan maka GNP potensialnya bisa dinaikkan. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi di sektor pertanian dan industri. Faktor itu adalah faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi adalah tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. Sedangkan faktor non ekonomi adalah keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, kerja keras masyarakat dan disiplin, serta sikap jujur. Dua faktor tersebut supaya meningkatkan sektor pertanian dan industri harus berjalan secara proporsional sehingga bisa meningkatkan GNP potensial.

Akumulasi modal merupakan faktor yang sangat berpengaruh diantara faktor yang lain. Tanpa akumulasi modal yang diinvestasikan, proses produksi

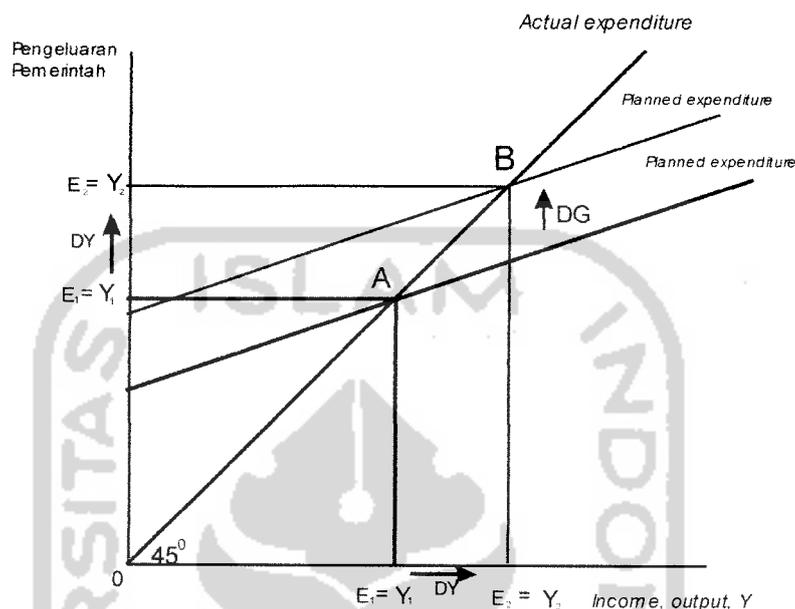
akan berhenti dan pertumbuhan GNP potensial akan berhenti. Sedangkan menurut Malthus yang bisa menyediakan dana tabungan untuk akumulasi modal tersebut adalah pengusaha yang menyisihkan keuntungannya, dan bukan penghematan konsumsi dari pelaku ekonomi non pengusaha. Malthus menganggap mereka terlalu miskin sehingga tidak akan mampu menyisihkan tabungan yang cukup untuk memdanai proses produksi. Penghematan konsumsi oleh pelaku jenis ini justru akan menurunkan permintaan efektif dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

4.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah daerah meliputi (a) pengeluaran rutin (belanja pegawai, biaya pemeliharaan, belanja barang, angsuran pinjaman, subsidi, dana pensiun, dan lain-lain), (b) pengeluaran pembangunan (bidang ekonomi, sosial, umum, subsidi pembangunan daerah, pembayaran pinjaman, lain-lain), (c) urusan kas dan perhitungan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 1993).

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam *Keynesian Cross* (Mankiw, 1999).

Gambar 4.1
Pengeluaran Pemerintah Pada Keynesian Cross



Pada grafik 4.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

4.4.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang mengembangkan teori pengeluaran pemerintah dengan tahap – tahap pengembangan ekonomi. Pada tahap awal dari perkembangan pemerintah ekonomi prosentase investasi pemerintah dari total investasi

besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pada tahap menengah perkembangan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.

Peranan pemerintah dalam pembangunan pada tahap menengah tetap besar, oleh karena itu banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan karena perkembangan ekonomi. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin erat. Musgrave berpendapat bahwa dalam proses perkembangan, investasi swasta dalam prosentase investasi pemerintah dalam prosentase terhadap GNP semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa perkembangan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran – pengeluaran untuk aktivitas sosial. (Suparmoko, 2000).

4.4.2. Hukum Wagner

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner law of increased government activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesebroto, 1993; 170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu

perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

P PP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 4.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

4.5. Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *selfsupporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana (Kaho, 1997:124). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, menyangkut tentang kebijakan keuangan daerah:

1. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas pembantuan,

2. Sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, atau dalam bentuk subsidi dan bantuan serta pinjaman,
3. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan aparaturnya.

Sebagai suatu sistem, keuangan daerah terdiri dari berbagai sub sistem antara lain organisasi, tata buku, prosedur, penganggaran, pengendalian, sarana dan prasarana. Selanjutnya mengingat keuangan daerah sebagai sub sistem maka penanganan keuangan daerah itu sendiri harus dilakukan dengan pendekatan kesisteman. Sehingga, kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dalam mengendalikan pemerintah daerah harus memperhatikan kondisi sebenarnya yang ada di daerah. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara, yakni (Kaho,1997:126):

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat,
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut,
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan,

5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, Pamudji (dalam Kaho,1997:125) menegaskan: “Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.” Selanjutnya, kebijakan keuangan itu sendiri pada akhirnya harus mampu menunjukkan kondisi yang sebenarnya bagi daerah dari segi kemandirian dalam keuangan. Yang pada akhirnya segala dari proses ini bermuara pada terpenuhinya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Bagaimanapun juga, berhasil tidaknya suatu kegiatan dilakukan dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal, akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksananya atau aparatur pemerintah daerah itu sendiri.

4.6. Kebutuhan Fiskal Daerah

Struktur dan jenis belanja daerah, aktifitas yang membutuhkan sumberdaya, serta pemicu biaya (*cost driver*) perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan daerah, sebab setiap daerah membutuhkan dana untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Belanja Administrasi Umum.
Biaya untuk keperluan tersebut mencakup keseluruhan biaya yang diperlukan agar organisasi pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif

dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada publik. Komponen biaya ini terdiri dari :

- a. Belanja pegawai, yakni biaya yang dikeluarkan berupa uang tunai yang dibayarkan kepada pegawai daerah otonom. Belanja pegawai ini terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya, tunjangan beras, honorarium dan vakansi, uang lembur, upah pegawai harian tetap, biaya pengobatan dan perawatan pegawai, dan belanja pegawai lain-lain.
- b. Belanja Barang/Jasa, yakni semua pengeluaran yang dilakukan untuk ongkos kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya Hansip, biaya pakaian dinas, pembelian peralatan dokter, pembelian alat-alat perlengkapan laboratorium, pembelian inventaris ruangan pasien, pembelian perlengkapan dapur rumah sakit, pembelian obat-obatan, pembelian bahan laboratorium, pembelian bahan percontohan, dan lain-lain.
- c. Belanja Pemeliharaan mencakup semua pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan rumah dinas, asrama, mess, dan sebagainya, pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah (KDH), pemeliharaan kendaraan dinas Wakil Kepala Daerah, pemeliharaan kendaraan dinas lainnya, pemeliharaan inventaris kantor, dan lain-lain.
- d. Belanja Perjalanan Dinas, yakni biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas pindah, biaya

pemulangan pegawai yang dipensiunkan, biaya perjalanan dinas lainnya.

Besar-kecilnya biaya penyelenggaraan pemerintahan dan atau belanja administrasi umum tidak dapat dikaitkan dengan jumlah pegawai karena akan mendorong pemerintah daerah untuk berlomba mengangkat atau menambah jumlah pegawai tanpa melakukan 'analisis kebutuhan'. Agar ukuran dan aktivitas organisasi pemerintah daerah tidak membengkak serta untuk mendorong efisiensi, setiap daerah perlu didorong untuk justru 'merampingkan' organisasi sesuai dengan standar dan atau kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Penyediaan barang dan prasarana khususnya belanja administrasi umum terkait dengan volume aktivitas berupa pemberian pelayanan, sehingga pemicu biaya ini sesungguhnya adalah volume aktivitas pelayanan. Volume aktivitas pelayanan sangat terkait dengan jumlah penduduk yang dilayani. Oleh karena itu secara umum, kebutuhan akan dana untuk belanja administrasi dan umum, dapat diproksi dengan menggunakan variabel jumlah penduduk.

2. Biaya Pemeliharaan Fasilitas Publik. Biaya ini mencakup keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasi untuk menjaga dan memelihara sarana dan prasarana publik yang dipunyai agar dapat beroperasi secara optimal. Unsur-unsur biaya ini meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas.

Berbeda dengan biaya sebelumnya, biaya ini tidak terkait dengan jumlah pegawai maupun ukuran organisasi. Biaya ini juga diidentifikasi tidak terkait secara nyata dengan luas wilayah, karena belum tentu daerah yang mempunyai wilayah cukup luas juga menyediakan fasilitas yang banyak. Standar fasilitas publik umumnya memang ditentukan berdasarkan fasilitas yang banyak, tetapi secara riil standar tersebut tidak pernah dipenuhi. Belanja pemeliharaan mempunyai hubungan langsung dengan volume aktivitas pemeliharaan yang dipicu oleh volume dan jumlah aktiva atau kekayaan tetap (fasilitas publik) berwujud yang dipunyai oleh daerah, antara lain: jalan dan jembatan, saluran pematasan, saluran irigasi atau pengairan, luas lahan milik daerah (yang memerlukan pemeliharaan), jumlah dan kapasitas kesehatan, jumlah dan kapasitas pendidikan.

3. Belanja Pembangunan merupakan pengeluaran-pengeluaran yang bukan saja ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, tetapi juga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, pengeluaran pembangunan mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk :
 - a. Sarana dan prasarana ekonomi, seperti pengeluaran untuk pembangunan jalan raya, pelabuhan, kapasitas listrik, energi dan lain-lain.
 - b. Peningkatan sumberdaya manusia: pendidikan, kesehatan dan peranan wanita.
 - c. Peningkatan kesejahteraan rakyat: pembangunan perumahan, pengembangan kehidupan beragama.

- d. Peningkatan kapasitas pemerintah: anggaran pengembangan aparatur pemerintah.
- e. Atau secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: belanja modal aparatur dan belanja modal publik. Dalam terminologi ekonomi publik besarnya belanja pembangunan mengindikasikan besarnya investasi pemerintah.

Hal ini didukung oleh Suparmoko (2000:44) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pengeluaran investasi yang menambah kekuatan dan *ketahanan ekonomi* di masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran yang langsung memberikan *kesejahteraan dan kegembiraan* bagi masyarakat seperti untuk bidang rekreasi.
- c. Pengeluaran yang merupakan *penghematan* untuk masa yang akan datang, misalnya: pengeluaran untuk anak yatim piatu.
- d. Pengeluaran untuk menyediakan *kesempatan kerja* yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Atas dasar penilaian tersebut, pengeluaran pemerintah dibedakan antara lain:

- Pengeluaran yang bersifat *self liquidating* baik sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa atau barang-barang yang bersangkutan.

- Pengeluaran yang *reproduktif*, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.

Dua pendekatan yang secara umum dapat digunakan untuk menentukan besarnya pengeluaran pemerintah dalam bentuk dana pembangunan daerah adalah :

- a. *Pendekatan Incrementalism*, yang didasarkan pada perubahan satu unit atau lebih variabel yang bersifat umum seperti jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat, maka besarnya alokasi dana untuk tiap kegiatan yang sudah tertentu akan meningkat dari besar alokasi semula.
- b. *Pendekatan line-item budget*, yaitu perencanaan anggaran yang didasarkan atas pos anggaran yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, meskipun keberadaan pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan.

Dipandang sebagai investasi, pengeluaran pembangunan sangat diperlukan guna menjaga dan memelihara momentum pembangunan secara berkelanjutan. Bersama-sama dengan investasi swasta domestik, pengeluaran ini tidak hanya berpengaruh pada sisi permintaan, tetapi juga berpengaruh pada sisi penawaran agregat, sebagaimana dikemukakan dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar (Jhingan, 2000). Sejalan dengan perkembangan ekonomi suatu daerah, kebutuhan akan pengeluaran pembangunan akan

semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rostow dan Musgrave dalam (Sutrisno, 1991) menyatakan bahwa pada tahap awal dari perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah dari total investasi adalah besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana jalan, irigasi, jembatan, tenaga listrik, jaringan komunikasi. Oleh karena itu adalah wajar jika dikatakan pengeluaran pemerintah akan makin meningkat dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, dimana dalam istilah Adolf Wagner dikenal dengan "*Gesets der Wachsenden Ausdehmug den Staatstatigkeiten*" atau hukum semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan negara.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk pembangunan, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4.7. Hipotesis.

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

- * Diduga bahwa pengeluaran pembangunan mempunyai hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1985-2005.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berbentuk time series dalam kurun waktu 20 tahun yaitu dari tahun 1985-2005. Data sekunder ini terdiri atas data pengeluaran pembangunan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data sekunder tersebut diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dan BPS.

5.2. Definisi Variabel.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan GDP/ GNP.

Pertumbuhan ekonomi di cari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{rumus} = \frac{PDRB_n - PDRB_{n-1}}{PDRB_{n-1}} \times 100\%$$

(Dajan, 1987)

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam perhitungan menggunakan PDRB riil atas tahun dasar 2000 (BPS, 2005)

b. Pengeluaran pembangunan

Adalah jumlah keseluruhan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan di seluruh sektor ekonomi atau pembelian pemerintah ke atas barang dan jasa untuk pengeluaran pembangunan. Misalnya pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Juta Rp per tahun. (BPS, 2005)

5.3. Metode Analisis Data

5.3.1. Uji Stasionaritas

Proses yang bersifat random atau stokastik merupakan kumpulan dari variabel random dalam urutan waktu. Setiap data *time series* yang kita punyai merupakan suatu data dari hasil proses stokastik. Suatu data hasil proses random dikatakan stasioner jika memenuhi kriteria, yaitu: jika rata-rata dan varian konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data runtun waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tertentu. Jika data *time series* tidak memenuhi kriteria tersebut maka data dikatakan tidak stasioner. Dengan kata lain data *time series* dikatakan tidak stasioner jika rata-ratanya maupun variannya tidak konstan, berubah-ubah sepanjang waktu. (*time-varying mean and variance*). Jika data tidak stasioner maka kita mempunyai regresi yang lancung. Untuk menghindari masalah regresi lancung ini kita harus mentransformasikan data nonstasioner menjadi data stasioner, adapun caranya adalah dengan menggunakan metode transformasi baik melalui uji akar unit dari ADF. (Widarjono, 2005).

Salah satu persyaratan penting untuk mengaplikasikan model seri waktu yaitu dipenuhinya asumsi data yang normal atau stabil (stasioner) dari variabel-variabel pembentuk persamaan regresi. Karena penggunaan

data dalam penelitian ini dimungkinkan adanya data yang tidak stasioner, maka dalam penelitian ini perlu digunakan beberapa uji stasioner. Dalam melakukan uji stasionaritas, penulis akan melakukan proses analisis yang terdiri dari :

a. Uji akar-akar unit (*root test*)

Uji akar-akar unit dapat dipandang sebagai uji stasioneritas, karena pada intinya uji tersebut untuk mengamati apakah koefisien tertentu dari model otoregresif mempunyai nilai satu atau tidak. Untuk itu penulis akan menggunakan pengujian yang dikembangkan oleh Dickey-Fuller, atau yang lebih dikenal dengan uji akar unit Dickey-Fuller (DF). Adapun formulasi uji DF sebagai berikut :

$$\Delta Y_t = \phi Y_{t-1} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \phi Y_{t-1} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \phi Y_{t-1} + e_t$$

dimana t adalah variabel trend waktu.

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik DF dengan nilai kritisnya yakni distribusi statistik τ . Nilai statistik DF ditunjukkan oleh nilai koefisien ϕY_{t-1} . Jika nilai absolut statistik DF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner. Sebaliknya data tidak stasioner jika nilai absolut nilai statistik DF lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik τ . (Widarjono, 2005).

Selain menggunakan uji *Dickey-Fuller* (DF) untuk mendeteksi apakah data stasioner atau tidak adalah dengan menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Adapun formulasi uji sebagai berikut :

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

dimana :

Y = Variabel yang diamati

$\Delta Y = Y_t - Y_{t-1}$

T = trend waktu

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya distribusi statistik Mackinnon. Nilai statistik ADF ditunjukkan oleh nilai koefisien γY_{t-1} . Jika nilai absolut statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner. Sebaliknya data tidak stasioner jika nilai absolut nilai statistik ADF lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik Mackinnon.

b. Uji integrasi

Apabila data yang telah diamati pada uji akar unit ternyata tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji derajat

integrasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat integrasi berapakah data yang diamati stasioner.

Uji integrasi ini mirip dengan uji akar-akar unit. Seperti uji akar-akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan stasioner dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai statistik ADF yang diperoleh dari koefisien regresi dengan nilai kritis distribusi statistik. Adapun formulasi uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) sebagai berikut :

$$\Delta Y_t = \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 T + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

dimana :

Y = Variabel yang diamati

$$\Delta Y = Y_t - Y_{t-1}$$

T = trend waktu

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai statistik ADF dengan nilai kritisnya distribusi statistik Mackinnon. Nilai statistik ADF ditunjukkan oleh nilai koefisien γY_{t-1} . Jika nilai absolut dari statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya pada diferensi pertama, maka data dikatakan stasioner pada derajat satu. Akan tetapi, jika nilainya lebih

kecil maka uji derajat integrasi perlu dilanjutkan pada diferensi yang lebih tinggi sehingga diperoleh data yang stasioner (Widarjono, 2005).

c. Uji kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi, dimana uji ini mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang yang stabil. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan uji yang dikembangkan oleh Johansen, dimana uji tersebut dapat digunakan untuk menentukan kointegrasi sejumlah variabel (vektor).

Penentuan ada tidaknya kointegrasi antar variabel didasarkan pada nilai *likelihood ratio* (LR). Nilai LR dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$Q_t = -T \sum_{i=r+1}^k \text{Log}(1-\lambda_i)$$

Untuk $r = 0, 1, \dots, k-1$ dimana λ_i adalah i eigenvalue yang paling besar. Jika nilai hitung LR lebih besar dari nilai kritis LR, maka dapat dikatakan adanya kointegrasi sejumlah variabel. Begitu juga sebaliknya jika nilai hitung LR lebih kecil dari nilai kritisnya, maka tidak terdapat adanya kointegrasi. (Widarjono, 2005)

5.3.2. Uji Kausalitas Granger

Uji Kausalitas Granger merupakan sebuah metode untuk mengetahui hubungan dimana disatu sisi suatu variabel dependen (variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi oleh variabel lain (independen variabel) dan sisi lain

variabel independen tersebut dapat menempati posisi dependen variabel. Hubungan seperti ini di sebut hubungan kausal atau hubungan timbal balik. (Arief, 1993). Maka variabel pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diformulasikan dalam dua bentuk model regresi sebagai berikut.

$$PB_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i PB_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j PE_{t-j} + U_t$$

$$PE_t = \sum_{i=1}^m \lambda_i PE_{t-i} + \sum_{j=1}^n \delta_j PB_{t-j} + U_t$$

Dimana :

PB_t : Pengeluaran Pembangunan

PE_t : Pertumbuhan Ekonomi

U_t : Variabel Pengganggu

n,m : Jumlah Lag

Hasil-hasil regresi kedua bentuk model ini akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi masing-masing, yaitu :

1. $\sum_{j=1}^n \beta_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^n \delta_j = 0$ maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi ke variabel pengeluaran pembangunan
2. $\sum_{j=1}^n \beta_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^n \delta_j \neq 0$ maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel pertumbuhan ekonomi ke variabel pengeluaran pembangunan

3. $\sum_{j=1}^n \beta = 0$ dan $\sum_{j=1}^n \delta_j = 0$ maka tidak terdapat kausalitas antara variabel pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi atau diantara kedua variabel tersebut
4. $\sum_{j=1}^n \beta \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^n \delta_j \neq 0$ maka terdapat kausalitas dua arah antara variabel pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi atau diantara kedua variabel tersebut.

5.3.3. *Final Prediction Error (FPE)*

Salah satu isu utama dalam analisis kausalitas adalah penentuan kelambanan (lag). Dengan penelitian ini metode pengujian yang digunakan adalah *Final Prediction Error* yang dikenalkan oleh Akaike (1969) untuk mendapatkan waktu kelambanan maksimal yang optimal.

Metode ini pada hakekatnya didasarkan dari model dengan menggunakan kriteria FPE minimum. Adapun kelebihan FPE adalah bisa menentukan kelambanan (lag) yang akan digunakan untuk analisis kausalitas. Kelemahan metode ini adalah hanya digunakan pada data time series, tidak bisa digunakan untuk data cross section. Metode ini secara praktis bisa dijelaskan dengan langka-langkah berikut (Utomo, 2001).

- a. Regres Y dengan nilai masa lalu Y dengan berbagai waktu kelambanan mamksimum (m) yang berbeda-beda.

$$Y_t = \sum_{n=1}^m \alpha_i Y_{t-1}$$

- b. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai m dengan rumus :

$$FPE_{y(m)} = \frac{N + m + 1}{N - m - 1} - \frac{SSE}{N}$$

Pada saat $FPE_{y(m)}$ minimum berarti m ini adalah waktu kelambanan maksimum optimal untuk variabel Y sebut saja sebagai $FPE_{y(m,0)}$

- c. Regres kembali Y terhadap masa lalu Y dengan waktu kelambanan maksimum optimal (m,0) dan nilai akhir masa lalu dengan berbagai waktu kelambanan maksimum (n) yang berbeda-beda.

$$Y_t = \sum_{i=1}^{(m,0)} \alpha_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^n \beta_j Y_{t-j}$$

- d. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai n dengan rumus

$$FPE_{y(m,n)} = \frac{N + (m,0) + n + 1}{N - (m,0) - n + 1} - \frac{SSE}{N}$$

Pada saat $FPE_{y(m,0)}$ minimum ini berarti waktu kelambanan maksimum optimal untuk variabel X, sebut saja sebagai $FPE_{y(mn,0)}$

- e. Bandingkan $FPE_{y(m,0)}$ dengan $FPE_{y(mn,0)}$. Apabila $FPE_{y(m,0)} < FPE_{y(mn,0)}$ berarti model yang tepat adalah model tanpa keberadaan variabel X, artinya X tidak menyebabkan Y. Apabila $FPE_{y(m,0)} > FPE_{y(mn,0)}$ berarti model yang tepat adalah model dengan keberadaan variabel X, Artinya X menyebabkan Y.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1. Hasil Analisis Data

Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder deret waktu (*time series*) yang berbentuk data tahunan, di mana mengambil periode waktu antara tahun 1985 sampai tahun 2005 bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa hubungan kausalitas pengeluaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, model yang digunakan sebagai alat analisis adalah model kausalitas yang dikemukakan oleh Granger. Untuk membantu perhitungan, penulis menggunakan program Eviews 3.0 (*Econometric Views*).

6.2. Hasil Analisis

6.2.1. Uji Stasioneritas

6.2.1.1. Uji akar-akar unit

Tahap pertama dari uji stasionaritas adalah dengan uji akar-akar unit, hal ini dilakukan untuk melihat apakah data stasioner atau tidak. Untuk melakukan uji akar-akar unit penulis menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

Penentuan apakah data stasioner atau tidak pada tingkat *level* yaitu dengan cara membandingkan nilai absolut statistik ADF dengan nilai

kritisnya, yaitu nilai kritis Mackinnon pada $\alpha = 1\%$; $\alpha = 5\%$; $\alpha = 10\%$.

Hasil pengujian akar-akar unit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Hasil uji akar-akar unit

Variabel	Nilai statistik ADF	Nilai kritis Mackinnon		
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$
PB	4.120933	-3.8304	-3.0294	-2.6552
PE	-2.229714	-3.8304	-3.0294	-2.6552

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

Dari hasil pengujian diatas, data PB sudah stasioner untuk $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 10\%$, karena nilai ADF 4,120933 lebih besar daripada nilai kritis Mackinnon -3,8304 pada $\alpha = 1\%$ dan -3,0294 pada $\alpha = 5\%$ dan -2,6552 pada $\alpha = 10\%$. Untuk data PE tidak stasioner pada $\alpha = 1\%$, $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 10\%$, karena nilai ADF -2.229714 lebih kecil daripada nilai kritis Mackinnon -3,8304 pada $\alpha = 1\%$ dan -3,0294 pada $\alpha = 5\%$ dan -2,6552 pada $\alpha = 10\%$.

6.2.1.2. Uji Integrasi

Setelah diketahui data yang ada tidak stasioner, maka langkah selanjutnya adalah membuat data menjadi stasioner melalui proses diferensi data. Uji stasioner data melalui proses diferensi ini disebut uji derajat integrasi. Selanjutnya penentuan yang sama dengan uji akar-akar unit, yaitu dengan membandingkan nilai absolut statistik ADF dengan nilai kritis Mackinnon. Berdasarkan pada uji stasioneritas dengan akar-

akar unit, PE tidak stasioner. Hasil estimasi uji derajat integrasi pada tingkat pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Hasil uji derajat integrasi pertama

Variabel	Nilai statistik ADF	Nilai kritis Mackinnon		
		$\alpha = 1\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$
PE	-3.766523	-3.8572	-3.0400	-2.6608

Sumber : Data diolah dengan *Eviews* (lampiran)

Dari hasil pengujian diatas, data PE sudah stasioner pada tingkat *integrasi pertama* pada $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 10\%$. Dengan nilai ADF -3,766523 lebih besar daripada nilai kritis Mackinnon -3,0400 pada $\alpha = 5\%$ dan -2,6608 $\alpha = 10\%$.

6.2.1.3. Uji kointegrasi

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan uji derajat integrasi, uji ini mengindikasikan adanya hubungan jangka panjang yang stabil. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan uji yang dikembangkan oleh Johansen, uji tersebut dapat digunakan untuk menentukan kointegrasi sejumlah variabel (vektor).

Penentuan ada tidaknya kointegrasi antar variabel didasarkan pada nilai *likelihood ratio* (LR). Jika nilai hitung LR lebih besar dari nilai kritis LR, maka dapat dikatakan adanya kointegrasi sejumlah variabel. Begitu juga sebaliknya jika nilai hitung LR lebih kecil dari nilai kritisnya, maka

tidak terdapat adanya kointegrasi. Hasil estimasi kointegrasi dapat dilihat berikut ini:

Tabel 6.3
Hasil Uji Kointegerasi

Date: 06/17/07 Time: 08:35				
Sample: 1985 2005				
Included observations: 19				
Test assumption: Linear deterministic trend in the data				
Series: PB PE				
Lags interval: 1 to 1				
Eigenvalue	Likelihood Ratio	5 Percent Critical Value	1 Percent Critical Value	Hypothesized No. of CE(s)
0.608466	23.19401	15.41	20.04	None **
0.246520	5.378012	3.76	6.65	At most 1 *

Dari hasil pengujian diatas, dapat dilihat nilai hitung LR (23,19401) lebih tinggi dari nilai kritis Osterwald-Lenun 15,41 pada $\alpha = 5\%$ dan 20,04 pada $\alpha = 1\%$. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian ini terkointegrasi pada $\alpha = 5\%$ dan $\alpha = 1\%$

6.2.2. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger merupakan sebuah metode analisis untuk mengetahui hubungan dimana di satu sisi suatu variabel dependen (variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas) dan disisi lain variabel independen tersebut dapat menempati posisi dependen variabel. Hubungan seperti ini sering disebut

sebagai hubungan timbal balik. Karena data PB dan PE stasioner, maka uji kausalitas Granger dilakukan pada data asli PB dan PE.

Untuk uji kausalitas Granger pada lag 1 menunjukkan hipotesis nol PE does not Granger Cause PB diterima karena nilai probabilitas 0,91592 lebih besar dari $\alpha = 0,10$. Artinya pertumbuhan ekonomi (PE) tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran pembangunan (PB). Sedangkan untuk hipotesis nol PB does not Granger Cause PE diterima karena nilai probabilitas 0,80187 lebih besar dari $\alpha = 0,10$. Artinya pengeluaran pembangunan (PB) tidak mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi (PE).

Tabel 6.4
Hasil uji Granger dengan lag 1

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/17/07 Time: 08:33
Sample: 1985 2005
Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	20	0.01148	0.91592
PB does not Granger Cause PE		0.06497	0.80187

Untuk uji kausalitas Granger pada lag 2 menunjukkan hipotesis nol PE does not Granger Cause PB diterima karena nilai probabilitas 0,61316 lebih besar dari $\alpha = 0,10$. Artinya pertumbuhan ekonomi (PE) tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran pembangunan (PB). Sedangkan untuk hipotesis nol PB does not Granger Cause PE diterima

karena nilai probabilitas 0,53701 lebih besar dari $\alpha = 0,10$. Artinya pengeluaran pembangunan (PB) tidak mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi (PE).

Tabel 6.5
Hasil uji Granger dengan lag 2

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/17/07 Time: 08:34
Sample: 1985 2005
Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	19	0.50663	0.61316
PB does not Granger Cause PE		0.65018	0.53701

Untuk uji kausalitas Granger pada lag 3 menunjukkan hipotesis nol PE does not Granger Cause PB diterima karena nilai probabilitas 0,66407 lebih besar dari $\alpha = 0,10$. Artinya pertumbuhan ekonomi (PE) tidak mempengaruhi besarnya pengeluaran pembangunan (PB). Sedangkan untuk hipotesis nol PB does not Granger Cause PE diterima karena nilai probabilitas 0,37975 lebih besar dari $\alpha = 0,10$. Artinya pengeluaran pembangunan (PB) tidak mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi (PE).

Tabel 6.6
Hasil uji Granger dengan lag 3

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/17/07 Time: 08:34
Sample: 1985 2005
Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	18	0.54099	0.66407
PB does not Granger Cause PE		1.12857	0.37975

Untuk uji kausalitas Granger pada lag 4 menunjukkan hipotesis nol PE does not Granger Cause PB ditolak karena nilai probabilitas 0,01490 lebih kecil dari $\alpha = 0,10$. Artinya pertumbuhan ekonomi (PE) mempengaruhi besarnya pengeluaran pembangunan (PB). Sedangkan untuk hipotesis nol PB does not Granger Cause PE diterima karena nilai probabilitas 0.37263 lebih besar dari $\alpha = 0,10$. Artinya pengeluaran pembangunan (PB) tidak mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi (PE).

Tabel 6.7
Hasil uji Granger dengan lag 4

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/17/07 Time: 08:34
Sample: 1985 2005
Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	17	6.10215	0.01490
PB does not Granger Cause PE		1.22504	0.37263

6.2.3. Final Prediction Error (FPE)

Final Prediction Error pada dasarnya mengasumsikan salah satu kelemahan utama uji kausalitas Granger yaitu berkaitan dengan penentuan lag (kelambanan waktu). Dalam penelitian ini metode pengujian yaitu menggunakan *Final Prediction Error* yang dikenalkan oleh Akaike (1969) untuk mendapatkan waktu kelambanan maksimal yang optimal. Metode ini pada hakekatnya didasarkan dari pemilihan model dengan menggunakan Kriteria FPE minimum. Hasil estimasi FPE dapat dilihat berikut ini:

Tabel 6.8
Hasil Uji FPE untuk PB dan PE

Time Lag	FPE untuk PB	FPE untuk PE
1.	24.86394	19.22319
2.	15.62496	11.47394
3.	12.70735	7.752642
4.	9.918058	5.177327
5	10.54255	9.442815

Pada tabel diatas menyajikan perhitungan FPE untuk PB dan PE dengan panjang lag adalah 4. berdasarkan pada tabel tersebut, nilai FPE yang paling minimum terjadi pada lag 4. Artinya panjangnya time lag yang optimum untuk kedua variabel tersebut adalah 4.

6.3. Pembahasan

Hasil uji kausalitas Granger dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi besarnya pengeluaran pembangunan (PB). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula besarnya realisasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagian kenaikan PDB/PNB. Adanya kenaikan PDB/PNB tersebut maka realisasi anggaran yang digunakan untuk pengeluaran pembangunan juga akan meningkat. Hal ini juga didukung oleh teorinya Peacock dan Wiseman. teori ini disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesobroto (1993) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesobroto, 1993) :“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP

menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan, kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang diinginkan. Pengeluaran pembangunan yang meliputi pembiayaan rupiah dan proyek, dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijaksanaan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam GBHN. Secara sektoral pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai proyek di setiap sektor yang terdiri dari sektor Industri; Pertanian dan Kehutanan; Sumber Daya Air dan Irigasi; Tenaga Kerja, Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi; Transportasi, Meteorologi dan Geofisika; Pertambangan dan Energi; Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; Pembangunan Daerah dan Pemukiman; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga; Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja; Agama; Hukum; dan sektor lainnya. Namun dalam kenyataan masih banyak persoalan-persoalan yang harus diatasi mengenai permasalahan pengeluaran pembangunan tersebut, misalnya :

1. Terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek KKN.

Rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pengeluaran pembangunan akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Karenanya, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja.

2. Tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan anggaran yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat (cost and benefit analysis) sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi publik.

Inilah merupakan sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti daerah-daerah yang ditandai oleh superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan di dalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer yang profesional dalam sektor publik. Bahkan terdapat negasi yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor swasta ke dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan *economic of scale* menjadi kerangka kerja utamanya. Oleh karena itu langkah-langkah reformasi keuangan pemerintah khususnya untuk anggaran pengeluaran

pembangunan sangat diperlukan mengingat banyaknya persoalan yang berkembang pada sektor itu seperti rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran, irasionalitas dalam pengelolaan, serta banyaknya penyimpangan atau penyalahgunaan. Langkah-langkah reformasi keuangan pemerintah harus dituntun dan diarahkan menuju terwujudnya nilai-nilai good governance yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga nantinya pengeluaran anggaran pemerintah bias efektif dan efisien serta bermanfaat bagi publik.



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. KESIMPULAN

Hasil uji kausalitas Granger dapat disimpulkan bahwa tidak ada kausalitas antara pertumbuhan ekonomi (PE) mempengaruhi besarnya pengeluaran pembangunan (PB). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula besarnya realisasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

7.2 IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, implikasi kebijaksanaan berkaitan dengan hasil penelitian adalah :

1. Perlunya perhatian pemerintah terhadap aspek-aspek pembangunan melalui peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pembangunan di wilayahnya. Pemerintah harus lebih memperhatikan sektor-sektor dominan diantaranya sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan agar PDRB menunjukkan peningkatan yang lebih besar sehingga nantinya

pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan dan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan juga bisa ditingkatkan.

2. Pengeluaran pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Maka, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah peningkatan efektifitas pengeluaran APBD khususnya pengeluaran pembangunan selain itu juga mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan program-program pemerintah yang dilakukan di daerah dan untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik, dalam artian harus benar-benar mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diterima. Oleh sebab itu perlu dilakukan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan peran pengeluaran pembangunan dalam perekonomian sehingga nantinya pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln (1992), *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- Arief, Sritua (1993), *Metodologi Penelitian Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (1985-2005), *Jawa Tengah Dalam Angka*, BPS, Yogyakarta.
- _____ (1985-2005), *Statistik Indonesia*, BPS, Yogyakarta.
- Dajan, Anton (1987), *Pengantar Metode Statistik*, LP3ES, Jakarta.
- Endang, Dwi Lestari (2005) “Analisa Kausalitas Granger antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah tahun 1978 – 2003, diambil pada tanggal 23 maret dari <http://adln.lib.ums.ac.id/>
- Fendityana, Tunggal Yoga (2005) “Analisis Uji Kausalitas Granger Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penanaman Modal asing Langsung Indonesia Periode 1986-2003, diambil pada tanggal 23 maret dari <http://adln.lib.unair.ac.id/>
- Gujarati, Damodar (2000), *Econometric*, Erlangga, Jakarta.
- Hakim, Abdul (2002), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Pertama, Ekonosia, Yogyakarta.
- Jhingan (2000), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerjemah: Guritno, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaho, Joseph Rewu (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penerjemah : Pamudji, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno (1993), *Ekonomi Publik*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory (1999), *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.
- Rostow dan Musgrave (1991), *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Penerjemah: Sutrisno, Erlangga, Jakarta.

Rahman, Arif (2005) *Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan Investasi serta Produk Domestik Bruto dengan menggunakan Metode Granger*, diambil pada tanggal 23 maret dari <http://adln.lib.ums.ac.id/>

Rosyadi, Imron (2000), *Hubungan Antara Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi 1979-1998*, diambil pada tanggal 23 dari <http://www.rudycr.tripot.com>

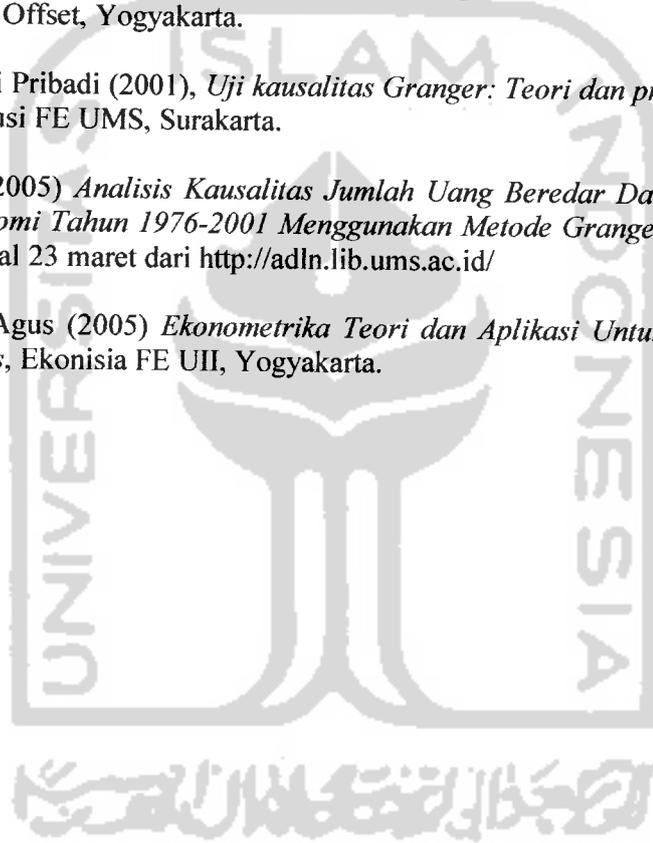
Suparmoko (2000), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE UGM, Yogyakarta.

_____ (2002), *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.

Utomo, Yuni Pribadi (2001), *Uji kausalitas Granger: Teori dan praktek*, Makalah Diskusi FE UMS, Surakarta.

Wida, lia (2005) *Analisis Kausalitas Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1976-2001 Menggunakan Metode Granger*, diambil pada tanggal 23 maret dari <http://adln.lib.ums.ac.id/>

Widarjono, Agus (2005) *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Ekonisia FE UII, Yogyakarta.





LAMPIRAN

**Data Perkembangan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran
Pembangunan Propinsi Jawa Tengah tahun 1985-2005**

Tahun	PDRB	PE	PB
1985	66703027.13	2.04	45274.78
1986	68064311.36	2.04	51775.57
1987	69453378.81	2.04	58533.43
1988	70870794.97	2.04	59970.01
1989	75448751.06	6.46	77390.03
1990	80728499.37	7.00	141497.27
1991	86507094.72	7.16	129558.52
1992	92943359.13	7.44	101723.41
1993	98609850.28	6.10	126693.61
1994	105476964.15	6.96	164629.41
1995	113222000.87	7.34	230044.21
1996	121487881.47	7.30	251713.6
1997	125166672.26	3.03	198586.41
1998	110468846.17	-11.74	224831.58
1999	114326423.12	3.49	286945.81
2000	114701304.81	0.33	354134.17
2001	118816400.29	3.59	367160.18
2002	123038541.13	3.55	869915.87
2003	129166462.45	4.98	1029687.19
2004	135789872.31	5.13	1761257.37
2005	143051213.88	5.35	1822411.29

Keterangan :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rp)

PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)

PB = Pengeluaran PEmbangunan (Juta Rp)

Tabel uji akar-akar unit

Uji akar-akar unit untuk Pengeluaran Pembangunan (PB)

ADF Test Statistic	4.120933	1% Critical Value*	-3.8304
		5% Critical Value	-3.0294
		10% Critical Value	-2.6552

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PB)

Method: Least Squares

Date: 06/17/07 Time: 08:35

Sample(adjusted): 1987 2005

Included observations: 19 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PB(-1)	0.781811	0.189717	4.120933	0.0008
D(PB(-1))	-1.440679	0.420836	-3.423373	0.0035
C	-43581.40	46909.70	-0.929049	0.3667
R-squared	0.524899	Mean dependent var		93191.35
Adjusted R-squared	0.465511	S.D. dependent var		193858.5
S.E. of regression	141727.5	Akaike info criterion		26.70514
Sum squared resid	3.21E+11	Schwarz criterion		26.85426
Log likelihood	-250.6988	F-statistic		8.838528
Durbin-Watson stat	1.311724	Prob(F-statistic)		0.002596

Uji akar-akar unit untuk Pertumbuhan Ekonomi (PE)

ADF Test Statistic	-2.229714	1% Critical Value*	-3.8304
		5% Critical Value	-3.0294
		10% Critical Value	-2.6552

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE)

Method: Least Squares

Date: 06/17/07 Time: 08:36

Sample(adjusted): 1987 2005

Included observations: 19 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE(-1)	-0.670809	0.300850	-2.229714	0.0404
D(PE(-1))	-0.092971	0.247926	-0.374994	0.7126
C	2.810429	1.542280	1.822256	0.0872
R-squared	0.376438	Mean dependent var		0.174211
Adjusted R-squared	0.298493	S.D. dependent var		5.339090
S.E. of regression	4.471809	Akaike info criterion		5.977402
Sum squared resid	319.9532	Schwarz criterion		6.126524
Log likelihood	-53.78532	F-statistic		4.829525
Durbin-Watson stat	1.981204	Prob(F-statistic)		0.022858

Tabel uji derajat integrasi tingkat diferensi pertama

Tabel uji ADF Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada tingkat diferensi pertama

ADF Test Statistic	-3.766523	1% Critical Value*	-3.8572
		5% Critical Value	-3.0400
		10% Critical Value	-2.6608

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE,2)

Method: Least Squares

Date: 06/17/07 Time: 08:36

Sample(adjusted): 1988 2005

Included observations: 18 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PE(-1))	-1.626918	0.431942	-3.766523	0.0019
D(PE(-1),2)	0.139716	0.255640	0.546535	0.5927
C	0.290345	1.236086	0.234891	0.8175
R-squared	0.719345	Mean dependent var	0.012222	
Adjusted R-squared	0.681924	S.D. dependent var	9.282696	
S.E. of regression	5.235275	Akaike info criterion	6.299727	
Sum squared resid	411.1215	Schwarz criterion	6.448123	
Log likelihood	-53.69755	F-statistic	19.22319	
Durbin-Watson stat	2.042374	Prob(F-statistic)	0.000073	

Tabel uji kointegrasi

Date: 06/17/07 Time: 08:35

Sample: 1985 2005

Included observations: 19

Test

assumption:

Linear

deterministic

trend in the

data

Series: PB PE

Lags interval: 1 to 1

Eigenvalue	Likelihood Ratio	5 Percent Critical Value	1 Percent Critical Value	Hypothesized No. of CE(s)
0.608466	23.19401	15.41	20.04	None **
0.246520	5.378012	3.76	6.65	At most 1 *

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 2 cointegrating equation(s) at 5% significance level

Unnormalized Cointegrating Coefficients:

PB	PE
1.33E-06	0.009983
-1.65E-07	0.066591

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s)

PB	PE	C
1.000000	7512.564 (9394.67)	-370725.3
Log likelihood	-304.5915	

Hasil Uji Granger

Hasil Uji Granger lag 1

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/17/07 Time: 08:33
Sample: 1985 2005
Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	20	0.01148	0.91592
PB does not Granger Cause PE		0.06497	0.80187

Hasil Uji Granger lag 2

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 06/17/07 Time: 08:34
Sample: 1985 2005
Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	19	0.50663	0.61316
PB does not Granger Cause PE		0.65018	0.53701

Hasil Uji Granger lag 3

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 06/17/07 Time: 08:34

Sample: 1985 2005

Lags: 3

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	18	0.54099	0.66407
PB does not Granger Cause PE		1.12857	0.37975

Hasil Uji Granger lag 4

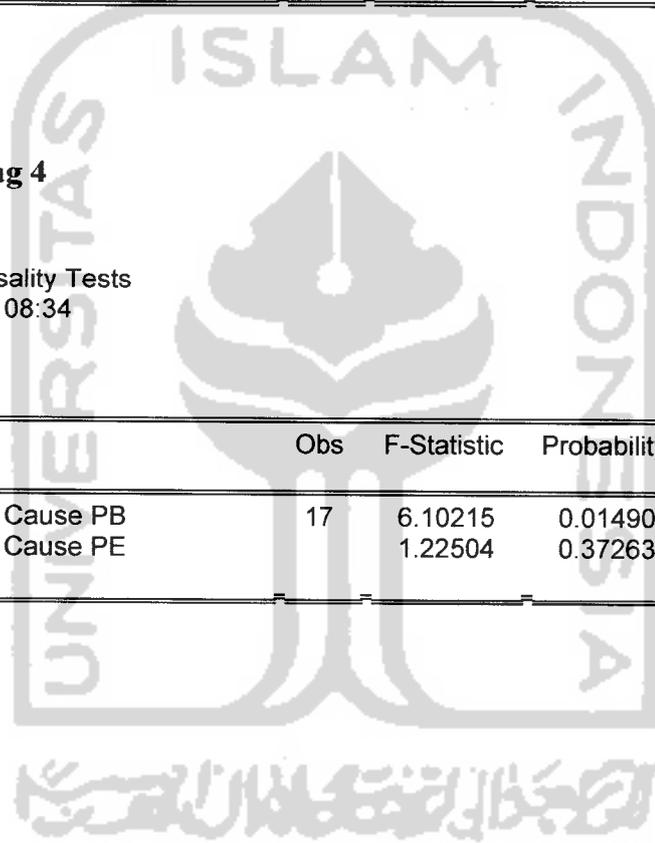
Pairwise Granger Causality Tests

Date: 06/17/07 Time: 08:34

Sample: 1985 2005

Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Probability
PE does not Granger Cause PB	17	6.10215	0.01490
PB does not Granger Cause PE		1.22504	0.37263



Hasil Uji FPE

Hasil Uji FPE Pengeluaran Pembangunan (PB) dengan lag 1

ADF Test Statistic	0.729254	1% Critical Value*	-3.8572
		5% Critical Value	-3.0400
		10% Critical Value	-2.6608

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PB,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:40

Sample(adjusted): 1988 2005

Included observations: 18 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PB(-1))	0.206486	0.283146	0.729254	0.4771
D(PB(-1),2)	-1.303542	0.281051	-4.638098	0.0003
C	35920.59	36779.47	0.976648	0.3442
R-squared	0.768261	Mean dependent var	3022.003	
Adjusted R-squared	0.737362	S.D. dependent var	261667.3	
S.E. of regression	134099.8	Akaike info criterion	26.60157	
Sum squared resid	2.70E+11	Schwarz criterion	26.74996	
Log likelihood	-236.4141	F-statistic	24.86394	
Durbin-Watson stat	1.608523	Prob(F-statistic)	0.000017	

Hasil Uji FPE Pengeluaran Pembangunan (PB) dengan lag 2

ADF Test Statistic	-0.085115	1% Critical Value*	-3.8877
		5% Critical Value	-3.0521
		10% Critical Value	-2.6672

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PB,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:42

Sample(adjusted): 1989 2005

Included observations: 17 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PB(-1))	-0.033539	0.394038	-0.085115	0.9335
D(PB(-1),2)	-0.867973	0.568069	-1.527937	0.1505
D(PB(-2),2)	0.417919	0.474090	0.881517	0.3940
C	40111.00	39698.77	1.010384	0.3307
R-squared	0.782881	Mean dependent var	3512.785	
Adjusted R-squared	0.732776	S.D. dependent var	269711.9	
S.E. of regression	139424.1	Akaike info criterion	26.73075	
Sum squared resid	2.53E+11	Schwarz criterion	26.92680	
Log likelihood	-223.2114	F-statistic	15.62496	
Durbin-Watson stat	1.908047	Prob(F-statistic)	0.000134	

Hasil Uji FPE Pengeluaran Pembangunan (PB) dengan lag 3

ADF Test Statistic	1.411616	1% Critical Value*	-3.9228
		5% Critical Value	-3.0659
		10% Critical Value	-2.6745

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PB,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:42

Sample(adjusted): 1990 2005

Included observations: 16 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PB(-1))	1.597364	1.131585	1.411616	0.1857
D(PB(-1),2)	-2.600627	1.256797	-2.069250	0.0629
D(PB(-2),2)	-1.385364	1.258060	-1.101191	0.2943
D(PB(-3),2)	-1.653651	1.072258	-1.542214	0.1513
C	16098.50	44164.69	0.364511	0.7224
R-squared	0.822091	Mean dependent var	2733.369	
Adjusted R-squared	0.757397	S.D. dependent var	278537.5	
S.E. of regression	137192.9	Akaike info criterion	26.74647	
Sum squared resid	2.07E+11	Schwarz criterion	26.98790	
Log likelihood	-208.9718	F-statistic	12.70735	
Durbin-Watson stat	1.675437	Prob(F-statistic)	0.000415	

Hasil Uji FPE Pengeluaran Pembangunan (PB) dengan lag 4

ADF Test Statistic	0.213109	1% Critical Value*	-3.9635
		5% Critical Value	-3.0818
		10% Critical Value	-2.6829

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PB,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:43

Sample(adjusted): 1991 2005

Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PB(-1))	0.343047	1.609724	0.213109	0.8360
D(PB(-1),2)	-1.201937	1.785728	-0.673080	0.5178
D(PB(-2),2)	0.096675	1.830483	0.052814	0.9590
D(PB(-3),2)	-0.292065	1.621157	-0.180159	0.8610
D(PB(-4),2)	1.423241	1.218265	1.168252	0.2727
C	26535.57	49020.21	0.541319	0.6014
R-squared	0.846391	Mean dependent var	-196.8880	
Adjusted R-squared	0.761053	S.D. dependent var	288058.3	
S.E. of regression	140809.4	Akaike info criterion	26.83738	
Sum squared resid	1.78E+11	Schwarz criterion	27.12060	
Log likelihood	-195.2803	F-statistic	9.918058	
Durbin-Watson stat	1.737391	Prob(F-statistic)	0.001846	

Hasil Uji FPE Pengeluaran Pembangunan (PB) dengan lag 5

ADF Test Statistic	1.266428	1% Critical Value*	-2.7570
		5% Critical Value	-1.9677
		10% Critical Value	-1.6285

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PB,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:44

Sample(adjusted): 1992 2005

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PB(-1))	2.273048	1.794849	1.266428	0.2410
D(PB(-1),2)	-3.031890	1.904881	-1.591643	0.1501
D(PB(-2),2)	-1.851099	2.035497	-0.909408	0.3897
D(PB(-3),2)	-2.445845	2.010072	-1.216795	0.2584
D(PB(-4),2)	0.174497	1.449420	0.120391	0.9071
D(PB(-5),2)	-1.685475	1.351222	-1.247371	0.2475
R-squared	0.868232	Mean dependent var	5220.905	
Adjusted R-squared	0.785877	S.D. dependent var	298138.1	
S.E. of regression	137958.7	Akaike info criterion	26.80482	
Sum squared resid	1.52E+11	Schwarz criterion	27.07871	
Log likelihood	-181.6338	F-statistic	10.54255	
Durbin-Watson stat	2.040503	Prob(F-statistic)	0.002302	

Hasil Uji FPE Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan lag 1

ADF Test Statistic	-3.766523	1% Critical Value*	-3.8572
		5% Critical Value	-3.0400
		10% Critical Value	-2.6608

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:44

Sample(adjusted): 1988 2005

Included observations: 18 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PE(-1))	-1.626918	0.431942	-3.766523	0.0019
D(PE(-1),2)	0.139716	0.255640	0.546535	0.5927
C	0.290345	1.236086	0.234891	0.8175
R-squared	0.719345	Mean dependent var	0.012222	
Adjusted R-squared	0.681924	S.D. dependent var	9.282696	
S.E. of regression	5.235275	Akaike info criterion	6.299727	
Sum squared resid	411.1215	Schwarz criterion	6.448123	
Log likelihood	-53.69755	F-statistic	19.22319	
Durbin-Watson stat	2.042374	Prob(F-statistic)	0.000073	

Hasil Uji FPE Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan lag 2

ADF Test Statistic	-2.927631	1% Critical Value*	-3.8877
		5% Critical Value	-3.0521
		10% Critical Value	-2.6672

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:45

Sample(adjusted): 1989 2005

Included observations: 17 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PE(-1))	-1.874564	0.640301	-2.927631	0.0118
D(PE(-1),2)	0.365932	0.490393	0.746201	0.4688
D(PE(-2),2)	0.151997	0.274645	0.553431	0.5894
C	0.337656	1.351537	0.249831	0.8066
R-squared	0.725865	Mean dependent var	0.012941	
Adjusted R-squared	0.662602	S.D. dependent var	9.568384	
S.E. of regression	5.557885	Akaike info criterion	6.470636	
Sum squared resid	401.5711	Schwarz criterion	6.666687	
Log likelihood	-51.00041	F-statistic	11.47394	
Durbin-Watson stat	1.988277	Prob(F-statistic)	0.000590	

Hasil Uji FPE Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan lag 3

ADF Test Statistic	-2.398864	1% Critical Value*	-3.9228
		5% Critical Value	-3.0659
		10% Critical Value	-2.6745

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:45

Sample(adjusted): 1990 2005

Included observations: 16 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PE(-1))	-2.089967	0.871232	-2.398864	0.0353
D(PE(-1),2)	0.566159	0.723443	0.782590	0.4504
D(PE(-2),2)	0.330235	0.529147	0.624090	0.5453
D(PE(-3),2)	0.119434	0.293229	0.407305	0.6916
C	0.106601	1.471253	0.072456	0.9435
R-squared	0.738161	Mean dependent var	-0.262500	
Adjusted R-squared	0.642947	S.D. dependent var	9.812331	
S.E. of regression	5.863252	Akaike info criterion	6.625592	
Sum squared resid	378.1549	Schwarz criterion	6.867026	
Log likelihood	-48.00474	F-statistic	7.752642	
Durbin-Watson stat	2.050147	Prob(F-statistic)	0.003187	

Hasil Uji FPE Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan lag 4

ADF Test Statistic	-1.883913	1% Critical Value*	-3.9635
		5% Critical Value	-3.0818
		10% Critical Value	-2.6829

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE,2)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:46

Sample(adjusted): 1991 2005

Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PE(-1))	-2.237968	1.187936	-1.883913	0.0922
D(PE(-1),2)	0.677136	1.029981	0.657426	0.5274
D(PE(-2),2)	0.417312	0.823349	0.506847	0.6244
D(PE(-3),2)	0.190466	0.596174	0.319481	0.7567
D(PE(-4),2)	0.044033	0.327883	0.134296	0.8961
C	-0.075854	1.656223	-0.045800	0.9645
R-squared	0.742022	Mean dependent var	-0.021333	
Adjusted R-squared	0.598700	S.D. dependent var	10.10752	
S.E. of regression	6.402938	Akaike info criterion	6.840565	
Sum squared resid	368.9785	Schwarz criterion	7.123785	
Log likelihood	-45.30424	F-statistic	5.177327	
Durbin-Watson stat	2.025859	Prob(F-statistic)	0.016327	

Hasil Uji FPE Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan lag 5

ADF Test Statistic	-1.990057	1% Critical Value*	-4.0681
		5% Critical Value	-3.1222
		10% Critical Value	-2.7042

*Mackinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE,3)

Method: Least Squares

Date: 06/25/07 Time: 19:47

Sample(adjusted): 1993 2005

Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PE(-1),2)	-6.559276	3.296023	-1.990057	0.0937
D(PE(-1),3)	4.228995	3.045655	1.388534	0.2143
D(PE(-2),3)	2.953147	2.530980	1.166800	0.2876
D(PE(-3),3)	1.813990	1.869296	0.970413	0.3693
D(PE(-4),3)	0.913851	1.162395	0.786180	0.4617
D(PE(-5),3)	0.329771	0.508261	0.648822	0.5405
C	0.160979	2.474677	0.065051	0.9502
R-squared	0.904240	Mean dependent var	-0.003846	
Adjusted R-squared	0.808481	S.D. dependent var	20.00548	
S.E. of regression	8.754979	Akaike info criterion	7.480855	
Sum squared resid	459.8980	Schwarz criterion	7.785059	
Log likelihood	-41.62556	F-statistic	9.442815	
Durbin-Watson stat	1.987582	Prob(F-statistic)	0.007568	